

**RENCANA KERJA (RENJA)
PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN CIREBON
2023**



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pada Anggaran Perubahan Tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan kegiatan lanjutan di tahun berjalan Adapun beberapa hal pada sub kegiatan di beberapa program terdapat pergeseran rincian belanja dan pergeseran anggaran serta penambahan anggaran guna mengoptimalkan kegiatan di tahun anggaran perubahan 2023 ini.

Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Cirebon Tahun 2023 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan berlanjutan di periode yang sama, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan.

Sesuai amanat tersebut maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2023 ini menyusun Rencana Kerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon Tahun 2023. Hal ini merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu pada periode lanjutan tahun berjalan guna mengoperasionalkan RKPD lanjutan di tahun berjalan yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



Rencana Kerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon Tahun 2023, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Visi Misi Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2024, Adapun yang menjadi Visi Kabupaten Cirebon Periode Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

"Terwujudnya Kabupaten Cirebon Yang Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju Dan Aman"

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Adapun Misi yang menjadi langkah kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Cirebon adalah pada *Misi Ketiga dan kelima* yaitu sebagai berikut :

Penjelasan Misi Ketiga : *Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika*

Penjelasan Misi Kelima : *Memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional.*

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon Tahun 2023, dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon Tahun 2023 yang telah ditetapkan dalam Prioritas



Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang penyusunannya memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

Adapun tahapan persiapan penyusunan Renja Perubahan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan Renja
2. Pengolahan Data dan Informasi
3. Tahap Perumusan Rancangan Renja
 - ✓ Pengolahan data dan informasi;
 - ✓ Analisis gambaran pelayanan OPD;
 - ✓ Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD;
 - ✓ Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD
 - ✓ Telaah terhadap rancangan awal RKPD
 - ✓ Perumusan tujuan dan sasaran;
 - ✓ Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
 - ✓ Perumusan kegiatan prioritas;
 - ✓ Penyajian awal dokumen rancangan Renja OPD;
 - ✓ Penyempurnaan rancangan kerja OPD;
 - ✓ Pembahasan forum OPD; dan
 - ✓ Penyesuaian dokumen rancangan Renja OPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.
4. Penyajian dan penyampaian rancangan Renja
5. Penetapan Renja.



Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon Tahun 2023, dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon Tahun 2023 yang telah ditetapkan dalam Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang penyusunannya memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2.LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon Tahun 2023 adalah :

- a. Landasan Idiil, Pancasila;
- b. Landasan Konstitusional, Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Landasan Operasional :
 - 1) Ketetapan MPR RI Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara;
 - 2) Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas KKN;
 - 3) Ketetapan MPR RI Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi;
 - 4) Ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia;
 - 5) Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan;



- 6) Ketetapan MPR RI Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional;
- 7) Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa;
- 8) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
- 9) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;
- 10) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 11) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
- 12) Undang-undang Nomor 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih;
- 13) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
- 14) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik;
- 15) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Penyiaran;
- 16) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum;
- 17) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- 18) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD;
- 19) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
- 20) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- 21) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 22) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan



Pemerintah Pusat dan Daerah;

- 23) Peraturan Pemerintah Nomor 12 dan 15 Tahun 1999 yang berkenaan dengan netralitas birokrasi (Pegawai Negeri);
- 24) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah;
- 25) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 31 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- 26) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM);
- 27) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
- 28) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 29) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI;
- 30) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;
- 31) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 32) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- 33) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 34) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 35) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 36) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- 37) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019
- 38) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata



Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

39) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

40) Peraturan Pemerintah Nomor 12 dan 15 Tahun 1999 yang berkenaan dengan netralitas birokrasi (Pegawai Negeri);

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon, bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, politik;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup kesatuan bangsa dan politik;



- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang lingkup kesatuan bangsa dan politik;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana **Urusan Wajib** bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri maka dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 98 Tahun 2018 tentang Fungsi, Tugas Pokok, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dapat disimpulkan menjadi kewenangan yang mencakup :

- a. mengkaji dan merumuskan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. merumuskan, menyusun dan menetapkan rencana dan program kerja Badan sebagai pedoman kerja sesuai kebijakan Pemerintah Daerah;
- c. memberikan pelayanan fasilitasi, mediasi, konsultasi, koordinasi, dan motivasi secara teknis administrasi dan operasional di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. memberikan izin/rekomendasi di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- e. memberi informasi serta saran pertimbangan kepada Bupati dalam hal urusan kesatuan bangsa dan politik sebagai bahan penetapan kebijakan Bupati;



- f. menyusun, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan tugas Badan sesuai dengan bidang tugas baik secara operasional maupun administrasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- g. menetapkan kebijakan operasional di bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan, serta politik dalam negeri;
- h. mengarahkan pelaksanaan kegiatan di bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan, serta politik dalam negeri;
- i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan seni, budaya, agama kemasyarakatan, dan politik dalam negeri;
- j. meningkatkan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan, dan politik dalam negeri;
- k. menyelenggarakan pengembangan budaya kerja aparatur daerah di lingkup Badan;
- l. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Badan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai bidang tugas dan fungsinya.



1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon Tahun 2023 dimaksudkan sebagai penetapan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Periode Anggaran Perubahan tahun 2023. Sedangkan tujuannya adalah :

1. Acuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mengoperasionalkan RKPD Perubahan Kabupaten Cirebon Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon untuk Anggaran Perubahan Tahun 2023.

1.4. SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN,

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.



BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra

SKPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan perkiraan capaian tahun 2023 yang mengacu pada APBD tahun 2023 yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja sudah ditetapkan dan selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD,

berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007, yang dikaji sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

SKPD, berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan hal kritis yang terkait dengan pelayanannya, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, dampaknya terhadap capaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals),



tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD lainnya yang langsung ditujukan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

3.2. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai :faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan atas rumusan program dan



kegiatan yang tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2021

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun $n-2=2023-2=2021$) berdasarkan target indikator kinerja program tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang disusun di atas berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal dimaksud Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon selama tahun 2021 dan perkiraan target tahun 2023. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :



A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja tahun anggaran 2021 sebagai referensinya.



Rencana Kerja Badan Kesbang dan Politik

Kabupaten Cirebon Tahun 2023

Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2021			
			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	91	4.668.608.607	91,90	4.290.772.462	91,90	4.290.772.462
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Meningkatnya Wawasan Kebangsaan Warga Negara	% (Kegiatan)	82	308.034.100	99,92	307.817.400	99,92	307.817.400
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Peningkatan Kualitas Pendidikan Politik Masyarakat	%	82	4.410.861.000	98,39	4.339.965.600	98,39	4.339.965.600
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	% (Kegiatan)	83	581.584.800	94,54	319.416.450	94,54	319.416.450
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	% (Kegiatan)	83	266.964.050	99,72	266.223.050	99,72	266.223.050
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan yang Dilakukan	%	80	3.775.024.850	89,57	3.381.415.557	89,57	3.381.415.557



LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SKPD (IKK/IKU) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Periode: Sampai dengan bulan April 2023

No	Kode	Sasaran Kinerja Indikator	Anggaran Target Satuan	Realisasi / Kinerja		Rasio (%)	Ket.
				Bulan ini	s/d Bulan ini		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	1.1.01.	Meningkatnya penyelesaian pergesekan (friksi) antar dan internal umat beragama	2.377.240.600	164.835.800	597.302.200	25.13	
		(IKK/IKU)-Prosentase Penyelesaian Friksi/Gesekan antar Umat Beragama (Non Kumulatif)	82 prosen	82.000	82.000	100	
2	1.1.02.	Meningkatnya penyelesaian konflik sosial	1.791.892.800	77.313.600	318.585.300	17.78	
		(IKK/IKU)-Prosentase Penyelesaian Konflik sosial (Non Kumulatif)	87 prosen	87.000	87.000	100	
3	1.1.03.	Meningkatnya penyelesaian pelanggaran norma agama, sosial dan adat	7.285.967.100	42.252.700	181.796.300	2.50	
		(IKK/IKU)-Penyelesaian pelanggaran norma agama, sosial dan adat (Non Kumulatif)	86 Prosen	86.000	86.000	100	
4	1.1.04.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	5.223.560.502	794.594.354	1.523.846.714	29.17	
		(IKK/IKU)-Indeks kepuasan masyarakat (Non Kumulatif)	85 Poin	85.000	85.000	100	



Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran Perubahan 2023

Sedangkan untuk tahun anggaran Perubahan 2023 dengan usulan sebesar **Rp. 16.678.661.002,-**terurai dalam Urusan yang Melekat pada Perangkat Daerah (Non Urusan) 1 (Satu) Program dan 7 (Tujuh) Kegiatan dan 22 (Dua Puluh Dua) Sub Kegiatan, serta Urusan Pemerintahan Umum 5 (Lima) Program, 5 (Lima) Kegiatan dan 17 (Tujuh Belas) Sub Kegiatan

diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100% atau minimal sama dengan tahun 2021, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.



Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Kabupaten Cirebon, pada dasarnya kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon adalah sebagai unsur penunjang utama dan mendasar yang akan memberikan nuansa lebih bagi peningkatan keberhasilan pelaksanaan seluruh program dan kegiatan di segala bidang, sehingga dijadikan sebagai suatu hal yang sangat penting dan merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukannya.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2023 dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut:

- a. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi penguatan bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat
- b. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam penanganan bidang kesatuan bangsa dan politik
- c. Belum optimalnya koordinasi dalam bidang kesatuan bangsa dan politik yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegitatannya
- d. Belum dipahaminya secara utuh tentang *outcome* yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi *outcome* kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan



- e. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, maupun Renja dalam merencanakan kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pelaksanaan urusan bidang kesatuan bangsa, dan politik, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon tahun 2019 – 2024 maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Strategi Mendorong berkembangnya tanggung jawab aparatur atas tugas– tugasnya dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapabilitas, kompensasi (reward and punishing), dan kesejahteraan pegawai.
 - b. Peningkatan kemampuan teknis aparat pelaksana.
 - c. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal.



- d. Memberikan dukungan sarana dan prasarana yang lebih mendukung sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi.
2. Strategi Mendorong masyarakat untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan bidang kesatuan bangsa, dan politik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepastian hukumnya dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. Membangun bersama masyarakat melalui penyusunan program pembangunan yang transparan, akuntabel dan demokratis, efektif dan efisien;
 - b. Pemantapan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan ;
 - c. Mewujudkan bidang kesatuan bangsa, dan politik yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.
3. Strategi Pemberdayaan seluruh potensi yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka mewujudkan good governance dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. Meningkatkan kualitas rencana bidang kesatuan bangsa, dan politik.
4. Strategi Membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan dalam kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan – kebijakan dan prosedur dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka menyusun program pembangunan sesuai dengan kebijakan publik, dan melaksanakan penelitian inovatif dalam rangka mendorong



terwujudnya visi dan misi Kabupaten Cirebon dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon

- b. Melaksanakan pembangunan yang terintegrasi antar sektor pembangunan dan satu daerah dengan yang lainnya.
5. Strategi Melakukan inovasi – inovasi dan terobosan – terobosan dalam bidang NSPM sebagai bagian dari operasional perencanaan bidang kesatuan bangsa, politik, pendataan dan pelaporan, penelitian dan pengembangan dilaksanakan dengan arah kebijakan :
- a. Pembangunan sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan melalui model aplikasi teknologi informasi dan GIS, yang mendukung manajemen pengelolaan sumber daya dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada
 - b. Peningkatan penelitian yang berkualitas guna mendukung disegala bidang

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Kedudukan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang ketahanan bangsa, pengembangan demokratisasi;
- d. pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan badan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana **Urusan Wajib** bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri maka dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dapat disimpulkan menjadi kewenangan yang mencakup :



- a. mengkaji dan merumuskan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. merumuskan, menyusun dan menetapkan rencana dan program kerja Badan sebagai pedoman kerja sesuai kebijakan Pemerintah Daerah;
- c. memberikan pelayanan fasilitasi, mediasi, konsultasi, koordinasi, dan motivasi secara teknis administrasi dan operasional di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. memberikan izin/rekomendasi di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- e. memberi informasi serta saran pertimbangan kepada Bupati dalam hal urusan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat sebagai bahan penetapan kebijakan Bupati;
- f. menyusun, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan tugas Badan sesuai dengan bidang tugas baik secara operasional maupun administrasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- g. menetapkan kebijakan operasional di bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, ketentraman, koordinasi perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM);
- h. mengarahkan pelaksanaan kegiatan di bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, ketentraman, dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM);
- i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang bina ideologi dan wawasan



- kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, ketentraman, koordinasi perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM);
- j. meningkatkan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, ketentraman, koordinasi perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM);
 - k. menyelenggarakan pengembangan budaya kerja aparatur daerah di lingkup Badan;
 - l. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Badan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai bidang tugas dan fungsinya

Kajian Terhadap Capaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di lakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Cirebon 2019-2024 dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon. Adapun Tabel Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Dengan Format Sebagai Berikut :



Rencana Kerja Badan Kesbang dan Politik

Kabupaten Cirebon Tahun 2023

No.	Program	Indikator	Kondisi Awal RPJM	Target Indikator					Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	40	42	52	62	75	78	117,2	42	52	Tercapai
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Prosentase meningkatnya wawasan kebangsaan warga negara	6	10	15	20	25	30	102,5	10	15	Tercapai
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Prosentase Peningkatan kualitas pendidikan politik masyarakat	78	80	82	84	87	88	79,3	80	82	Tercapai
4	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	meningkatnya pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	5	13	15	20	25	27	61	13	15	Tercapai
5	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	meningkatnya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	4	5	20	25	25	25	101,1	5	20	Tercapai
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Sosial	Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan yang di lakukan	10	8	10	12	14	16	124,6	8	10	Tercapai



Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai. Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan.

Dengan nilai IKM (Nilai Interval Konversi IKM) sebesar 90-100%, dan melihat tabel tersebut di atas maka dapat dikatakan Kinerja Unit Pelayanan dan Mutu Pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Cirebon "SANGAT BAIK". Untuk bisa mewujudkan pelaksanaan pelayanan prima diperlukan komitmen untuk melaksanakan transparansi dan akuntabilitas, baik oleh pengambilan keputusan, pimpinan unit pelaksana dan pelaksana pelayanan publik, untuk selalu berupaya memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, sederhana, dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif



Permasalahan

Era globalisasi dan gerakan reformasi nasional telah menghasilkan berbagai perubahan kondisi kehidupan masyarakat dan daerah Kabupaten Cirebon yang muncul sedemikian cepatnya. Dinamika yang terjadi dalam kehidupannya itu, telah membawa implikasi yang sangat luas dan mendasar terhadap kehidupan sosial politik di Daerah dan orientasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara cepat dan drastis.

Ternyata dampak dari terjadinya perubahan tersebut, secara umum telah memunculkan berbagai kecenderungan baru dalam kehidupan masyarakat yang menunjukkan kecenderungan menurunnya kualitas kehidupan jati diri masyarakat, bangsa dan negara. Kondisi ini menuntut semua unsur masyarakat baik para elite politik dan pemuka masyarakat maupun penyelenggara pemerintahan untuk lebih bersatu dan bekerja keras melakukan upaya meningkatkan kembali harkat, martabat dan kesejahteraan seluruh masyarakatnya.

Disamping hal tersebut, lahirnya berbagai kebijakan umum baru di bidang Sosial dan Politik telah memunculkan paradigma baru dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Oleh karena itulah, maka Pemerintah Kabupaten Cirebon perlu menghadapinya sebagai suatu tantangan besar yang dapat dijadikan sebagai pendorong bagi peningkatan kesungguhan upaya mengaktualisasikan pelayanannya kepada masyarakat yang lebih variatif dan berkualitas dalam perkembangan penerapan otonomi daerah melalui



penciptaan sistem atau paradigma baru peranannya untuk mengimbangi berbagai perubahan sosial dan politik dengan berbagai kecenderungannya.

Sejalan dengan hal-hal tersebut di atas, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai salah satu perangkat Pemerintah Kabupaten Cirebon perlu mereposisi peranannya di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik melalui tahapan-tahapan, kebijaksanaan, program, kegiatan dalam pencapaian tujuan yang memiliki kriteria : sistematis, logis, realistis, praktis, konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Cirebon mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :

1. Tersedianya sarana / prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon.
2. Adanya penyelenggaraan mekanisme perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik yang bersifat partisipatif.
3. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik antara lain : DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat Kecamatan dan desa, organisasi profesi, perguruan tinggi dan sektor swasta.



4. Meningkatnya efektifitas produk-produk pengembangan dan penelitian/pengkajian bidang kesatuan bangsa dan politik berupa hasil kajian, yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

Namun peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk program dan kegiatan. Beberapa permasalahan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon dalam peningkatan kualitas produk dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme bidang kesatuan bangsa dan politik;
2. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas;
3. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;
4. Belum tersedianya prosedur standar operasional bidang kesatuan bangsa dan politik untuk mendukung pelaksanaan tupoksi;
5. Lemahnya kapasitas kelembagaan bidang kesatuan bangsa dan politik di tingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan dan serta SKPD terkait yang menyebabkan kurang optimalnya proses koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan sehingga berdampak pada kualitas produk perencanaan pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik tahunan dengan contoh dalam penyusunan prioritas usulan pembangunan;
6. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik;



7. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik sering tidak tepat waktu/tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan;
8. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;
9. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus diakomodasi dalam perencanaan bidang kesatuan bangsa dan politik maupun penganggaran.

2.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Tugas Pokok dan Fungsi

1. Inovasi-inovasi di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dengan melibatkan masyarakat/fasilitasi untuk mengantisipasi perubahan dan dinamika yang terjadi, dan tugas-tugas lain yg diberikan pimpinan, serta tuntutan masyarakat.
2. Penelitian-penelitian lintas sektor yang memberikan dampak besar bagi pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Cirebon yang strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan, koordinasi, dan dinamika perubahan.



3. Koordinasi internal dan eksternal sebagai bahan evaluasi.
4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan untuk meminimalkan deviasi terhadap Visi dan Misi.
5. Memanfaatkan peluang untuk menentukan kebijakan dan proses perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat/fasilitasi untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi pembangunan kota secara lebih terstruktur.
6. Memanfaatkan kontrol masyarakat untuk meningkatkan hasil penelitian lintas sektor untuk meningkatkan kualitas perencanaan, koordinasi, dan monitoring dan evaluasi.

Sumber Daya Manusia Aparatur

1. Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan.
2. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur.
3. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekrutmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.

Sarana dan Prasarana

1. Mengembangkan TI dan GIS serta perangkat keras dan kelengkapannya dalam mendukung manajemen pengelolaan program dan kegiatan yang lebih baik dalam menunjang pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik.



2. Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.
3. Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan.
4. Optimasi dan penambahan/pemanfaatan ruangan untuk memenuhi standard kelayakan kerja.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN TAHUN 2023

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon pada rancangan awal RKPD adalah bahwa bidang kesatuan bangsa dan politik adalah suatu tonggak yang dapat dijadikan landasan gerak dalam setiap langkah yang dilakukan oleh seluruh unsur terkait dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Kesatuan dan persatuan, kestabilan dinamika politik dan kondusifitas daerah adalah suatu kondisi yang sangat diharapkan oleh semua pihak sehingga menjamin suatu kelancaran perjalanan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Oleh karenanya pengamatan dan pengkajian yang mengarah pada terciptanya kesatuan dan persatuan, kestabilan dinamika politik dan kondusifitas daerah yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik harus senantiasa didukung dengan berbagai faktornya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasinya.

Meskipun bidang kesatuan bangsa dan politik tidak dijadikan sebagai salah satu SPM Pemerintah Daerah tetapi hal ini merupakan kewenangan wajib yang harus dilakukan, sehingga kelembagaan serta program dan



kegiatannya dapat berperan secara optimal di dalam menciptakan pra kondisi bagi terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara efisien dan efektif serta dukungan partisipasi semua unsur baik dari partisipasi pemangku kepentingan, profesionalisme SDM dan ketersediaan sumber dana yang memadai perlu sangat diutamakan (menjadi prioritas utama). Sesuai Tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Cirebon mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai *selama kurun waktu 5 (lima) Tahun 2019-2024* dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Cirebon mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. Adapun Review terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan 2023 adalah sebagai berikut:



**Rencana Kerja Badan Kesbang dan Politik
Kabupaten Cirebon Tahun 2023**



**RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

PERANGKAT DAERAH: 8-1.0-0.0-0.01. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

REVIEW TERHADAP RANWAL RKPD PERUBAHAN TAHUN 2023

Rancangan Awal RKPD															Hasil Analisis Kebutuhan														
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023						Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023																	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif														
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah /					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah /												
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8-	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8-												
8,	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					14.012.088.302	16.678.661.002	2.666.572.700	8,	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						14.012.088.302	16.678.661.002	2.666.572.700											
8.01.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					14.012.088.302	16.678.661.002	2.666.572.700	8.01.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						14.012.088.302	16.678.661.002	2.666.572.700											
8.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang sesuai standar kebutuhan pelayanan prima		75 Prosen	75 Prosen	282.706.000	282.706.000	-	8.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang sesuai standar kebutuhan pelayanan prima		75 Prosen	75 Prosen	282.706.000	282.706.000	-												
		prosentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai dengan standar pelayanan		82 Prosen	82 Prosen	634.528.302	634.485.702	(42.600)			prosentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai dengan standar pelayanan		82 Prosen	82 Prosen	634.528.302	634.485.702	(42.600)												
		Prosentase meningkatnya disiplin aparatur		94 Prosen	94 Prosen	4.087.441.300	4.175.389.100	87.947.800			Prosentase meningkatnya disiplin		94 Prosen	94 Prosen	4.087.441.300	4.175.389.100	87.947.800												
		Prosentase meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang transparan akuntabel dan informatif		100 Prosen	100 Prosen	57.596.000	57.596.000	-			Prosentase meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang transparan		100 Prosen	100 Prosen	57.596.000	57.596.000	-												
		Prosentase meningkatnya sistem perencanaan sektoral		100 Prosen	100 Prosen	73.383.700	73.383.700	-			Prosentase meningkatnya sistem perencanaan sektoral		100 Prosen	100 Prosen	73.383.700	73.383.700	-												
8.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 BA	1 BA	117.812.500	117.812.500	-	8.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 BA	1 BA	117.812.500	117.812.500	-												
8.01.01.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat, Daerah	Kabupaten Cirebon	5 Dok	5 Dok	73.383.700	73.383.700	-	8.01.01.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat, Daerah	Kabupaten Cirebon	5 Dok	5 Dok	73.383.700	73.383.700	-												
8.01.01.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	637	Kabupaten Cirebon	4 Laporan	4 Laporan	44.428.800	44.428.800	-	8.01.01.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Cirebon	37	4 Laporan	44.428.800	44.428.800	-												

8.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1 BA	1 BA	4.167.350.500	4.167.350.500		8.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1 BA	1 BA	4.167.350.500	4.167.350.500	
8.01.01.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan, Tunjangan ASN	Kabupaten Cirebon	17 Orang/Bulan	17 Orang/Bulan	4.066.235.500	4.154.183.300	87.947.800	8.01.01.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan, Tunjangan ASN	Kabupaten Cirebon	17 Orang/Bulan	17 Orang/Bulan	4.066.235.500	4.154.183.300	87.947.800
8.01.01.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Cirebon	1 Laporan	1 Laporan	6.823.200	6.823.200		8.01.01.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Cirebon	1 Laporan	1 Laporan	6.823.200	6.823.200	
8.01.01.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kabupaten Cirebon	4 Laporan	4 Laporan	6.344.000	6.344.000		8.01.01.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kabupaten Cirebon	4 Laporan	4 Laporan	6.344.000	6.344.000	
8.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		1 BA	1 BA	21.205.800	21.205.800		8.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		1 BA	1 BA	21.205.800	21.205.800	
8.01.01.01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut, Kelengkapan	Kabupaten Cirebon	36 Paket	36 Paket	21.205.800	21.205.800		8.01.01.01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut, Kelengkapan	Kabupaten Cirebon	36 Paket	36 Paket	21.205.800	21.205.800	
8.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		1 BA	1 BA	406.455.300	406.455.300		8.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		1 BA	1 BA	406.455.300	406.455.300	
8.01.01.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi, Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Cirebon	8 Paket	8 Paket	9.026.800	9.026.800		8.01.01.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi, Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Cirebon	8 Paket	8 Paket	9.026.800	9.026.800	
8.01.01.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan, Kantor yang Disediakan	Kabupaten Cirebon	4 Paket	4 Paket	62.632.200	62.632.200		8.01.01.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan, Kantor yang Disediakan	Kabupaten Cirebon	4 Paket	4 Paket	62.632.200	62.632.200	
8.01.01.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang,	Kabupaten Cirebon	2 Paket	2 Paket	2.717.200	2.717.200		8.01.01.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang,	Kabupaten Cirebon	2 Paket	2 Paket	2.717.200	2.717.200	
8.01.01.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan	Kabupaten Cirebon	18 Paket	18 Paket	28.000.100	28.000.100		8.01.01.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan	Kabupaten Cirebon	18 Paket	18 Paket	28.000.100	28.000.100	
8.01.01.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	-	3 Dokumen	3 Dokumen	19.100.000	19.100.000		8.01.01.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	-	3 Dokumen	3 Dokumen	19.100.000	19.100.000	
8.01.01.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang	Kabupaten Cirebon	49 Paket	49 Paket	141.416.100	141.416.100		8.01.01.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang	Kabupaten Cirebon	49 Paket	49 Paket	141.416.100	141.416.100	
8.01.01.01.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Cirebon	3 Laporan	3 Laporan	13.095.000	13.095.000		8.01.01.01.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Cirebon	3 Laporan	3 Laporan	13.095.000	13.095.000	
8.01.01.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat, Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Cirebon	45 Laporan	45 Laporan	130.467.900	130.467.900		8.01.01.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat, Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Cirebon	45 Laporan	45 Laporan	130.467.900	130.467.900	

8.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 BA	1 BA	213.070.000	213.070.000		8.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		1 BA	1 BA	213.070.000	213.070.000	
8.01.01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kabupaten Cirebon	2 Unit	2 Unit	13.070.000	13.070.000		8.01.01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kabupaten Cirebon	2 Unit	2 Unit	13.070.000	13.070.000	
8.01.01.2.07.10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-(Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	3 Unit	3 Unit	200.000.000	200.000.000		8.01.01.2.07.10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-(Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	3 Unit	3 Unit	200.000.000	200.000.000	
8.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		5 BA	5 BA	99.827.152	99.827.152		8.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		5 BA	5 BA	99.827.152	99.827.152	
8.01.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		3 Laporan	3 Laporan	81.817.152	81.817.152		8.01.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		3 Laporan	3 Laporan	81.817.152	81.817.152	
8.01.01.2.08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan, Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Cirebon	5 Laporan	5 Laporan	18.010.000	18.010.000		8.01.01.2.08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan, Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Cirebon	5 Laporan	5 Laporan	18.010.000	18.010.000	
8.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 BA	1 BA	197.839.250	197.839.250		8.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 BA	1 BA	197.839.250	197.839.250	
8.01.01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Cirebon	25 Unit	25 Unit	136.074.850	111.395.750	(24.679.100)	8.01.01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Cirebon	25 Unit	25 Unit	136.074.850	111.395.750	(24.679.100)
8.01.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kabupaten Cirebon	21 Unit	21 Unit	10.181.000	34.817.500	24.636.500	8.01.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kabupaten Cirebon	21 Unit	21 Unit	10.181.000	34.817.500	24.636.500
8.01.01.2.09.05.	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kabupaten Cirebon	6 Unit	6 Unit	2.045.000	2.045.000		8.01.01.2.09.05.	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kabupaten Cirebon	6 Unit	6 Unit	2.045.000	2.045.000	
8.01.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Cirebon	6 Unit	6 Unit	49.581.000	49.581.000		8.01.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Cirebon	6 Unit	6 Unit	49.581.000	49.581.000	
8.01.02.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Prosentase meningkatnya wawasan kebangsaan warga negara		25 Prosen	25 Prosen	1.216.384.200	1.103.764.400	(112.619.800)	8.01.02.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Prosentase meningkatnya wawasan kebangsaan warga negara		25 Prosen	25 Prosen	1.216.384.200	1.103.764.400	(112.619.800)
		Prosentase meningkatnya kemitraan dalam berwawasan kebangsaan		17 Prosen	17 Prosen	-	-				Prosentase meningkatnya kemitraan dalam berwawasan kebangsaan		17 Prosen	17 Prosen	-	-	

8.01.02.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		1 BA	1 BA	1.103.764.400	1.103.764.400		8.01.02.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		1 BA	1 BA	1.103.764.400	1.103.764.400	
8.01.02.2.01.01.	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan, yang Disusun	Kesbangpol. Jl. Sunan Muria No.14 Sumber Kab. Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	4 Dokumen	4 Dokumen	37.546.000	37.546.000		8.01.02.2.01.01.	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan, yang Disusun	Kesbangpol. Jl. Sunan Muria No.14 Sumber Kab. Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	4 Dokumen	4 Dokumen	37.546.000	37.546.000	
8.01.02.2.01.03.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan, Sejarah Kebangsaan	Kesbangpol. Jl. Sunan Muria No.14 Sumber Kab. Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	890 Orang	890 Orang	1.089.112.600	976.492.800	(112.619.800)	8.01.02.2.01.03.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan, Sejarah Kebangsaan	Kesbangpol. Jl. Sunan Muria No.14 Sumber Kab. Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	890 Orang	890 Orang	1.089.112.600	976.492.800	(112.619.800)
8.01.02.2.01.04.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,	Kesbangpol. Jl. Sunan Muria No.14 Sumber Kab. Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	60 Orang	60 Orang	55.255.600	55.255.600		8.01.02.2.01.04.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,	Kesbangpol. Jl. Sunan Muria No.14 Sumber Kab. Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	60 Orang	60 Orang	55.255.600	55.255.600	
8.01.02.2.01.05.	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan, Sejarah Kebangsaan	Kesbangpol. Jl. Sunan Muria No.14 Sumber Kab. Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	3 Laporan	3 Laporan	34.470.000	34.470.000		8.01.02.2.01.05.	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan, Sejarah Kebangsaan	Kesbangpol. Jl. Sunan Muria No.14 Sumber Kab. Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	3 Laporan	3 Laporan	34.470.000	34.470.000	
8.01.03.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Prosentase peningkatan kualitas pendidikan politik masyarakat		87 Prosen	87 Prosen	4.112.563.000	6.182.202.700	2.069.639.700	8.01.03.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Prosentase peningkatan kualitas pendidikan politik masyarakat		87 Prosen	87 Prosen	4.112.563.000	6.182.202.700	2.069.639.700

8.01.03.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		1 BA	1 BA	6.182.202.700	6.182.202.700		8.01.03.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		1 BA	1 BA	6.182.202.700	6.182.202.700	
8.01.03.03.2.01.01.	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Kesbangpol. Jl. Sunan Muria No.14 Sumber Kab. Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	879 Dokumen	879 Dokumen	95.466.800	95.466.700	(100)	8.01.03.03.2.01.01.	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Kesbangpol. Jl. Sunan Muria No.14 Sumber Kab. Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	879 Dokumen	879 Dokumen	95.466.800	95.466.700	(100)
8.01.03.03.2.01.03.	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	Kesbangpol. Jl. Sunan Muria No.14 Sumber Kab. Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	484 Orang	484 Orang	101.255.800	101.255.800		8.01.03.03.2.01.03.	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	Kesbangpol. Jl. Sunan Muria No.14 Sumber Kab. Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	484 Orang	484 Orang	101.255.800	101.255.800	
8.01.03.03.2.01.05.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kesbangpol. Jl. Sunan Muria No.14 Sumber Kab. Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	25 Laporan	25 Laporan	3.915.840.400	5.985.480.200	2.069.639.800	8.01.03.03.2.01.05.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kesbangpol. Jl. Sunan Muria No.14 Sumber Kab. Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	25 Laporan	25 Laporan	3.915.840.400	5.985.480.200	2.069.639.800
8.01.04.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Prosentase Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		25 Prosen	25 Prosen	523.414.300	523.414.200	(100)	8.01.04.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Prosentase Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		25 Prosen	25 Prosen	523.414.300	523.414.200	(100)
8.01.04.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		1 BA	1 BA	523.414.200	523.414.200		8.01.04.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		1 BA	1 BA	523.414.200	523.414.200	

8.01.04.04.2.01.01.	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah, yang Disusun	Kesbangpol. Jl. Sunan Muria No.4 Sumber Kab. Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-	8.01.04.04.2.01.01.	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah, yang Disusun	Kesbangpol. Jl. Sunan Muria No.4 Sumber Kab. Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-
8.01.04.04.2.01.02.	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Kesbangpol. Jl. Sunan Muria No.14 Sumber Kab. Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	2 Dokumen	2 Dokumen	160.952.500	160.952.500	-	8.01.04.04.2.01.02.	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Kesbangpol. Jl. Sunan Muria No.14 Sumber Kab. Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	2 Dokumen	2 Dokumen	160.952.500	160.952.500	-
8.01.04.04.2.01.03.	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas, Asing di Daerah	Kesbangpol Jl. Sunan Muria No.14 Sumber Kab. Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	1.856 Orang	1.856 Orang	288.662.000	288.662.000	-	8.01.04.04.2.01.03.	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas, Asing di Daerah	Kesbangpol Jl. Sunan Muria No.14 Sumber Kab. Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	1.856 Orang	1.856 Orang	288.662.000	288.662.000	-
8.01.04.04.2.01.05.	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas, Asing di Daerah	Kesbangpol. Jl. Sunan Muria No.14 Sumber Kab. Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	8 Laporan	8 Laporan	73.799.800	73.799.700	(100)	8.01.04.04.2.01.05.	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas, Asing di Daerah	Kesbangpol. Jl. Sunan Muria No.14 Sumber Kab. Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	8 Laporan	8 Laporan	73.799.800	73.799.700	(100)
8.01.05.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Prosentase Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		25 Prosen	25 Prosen	1.646.830.600	1.268.478.600	(378.352.000)	8.01.05.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Prosentase Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		25 Prosen	25 Prosen	1.646.830.600	1.268.478.600	(378.352.000)
8.01.05.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya		1 BA	1 BA	1.268.478.600	1.268.478.600	-	8.01.05.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya		1 BA	1 BA	1.268.478.600	1.268.478.600	-
8.01.05.05.2.01.01.	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Kesbangpol. Jl. Sunan Muria No.14 Sumber Kab. Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	3 Dokumen	3 Dokumen	36.841.000	36.841.000	-	8.01.05.05.2.01.01.	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Kesbangpol. Jl. Sunan Muria No.14 Sumber Kab. Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	3 Dokumen	3 Dokumen	36.841.000	36.841.000	-
8.01.05.05.2.01.02.	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Kesbangpol. Jl. Sunan Muria No.14 Sumber Kab. Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	-	8.01.05.05.2.01.02.	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kesbangpol. Jl. Sunan Muria No.14 Sumber Kab. Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	-

8.01.05.05.2.01.03.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kesbangpol. Jl. Sunan Muria No.14 Sumber Kab. Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	2.660 Orang	2.660 Orang	1.520.880.000	1.142.528.200	(378.351.800)	8.01.05.05.2.01.03.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kesbangpol. Jl. Sunan Muria No.14 Sumber Kab. Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	2.660 Orang	2.660 Orang	1.520.880.000	1.142.528.200	(378.351.800)
8.01.05.05.2.01.04.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kesbangpol. Jl. Sunan Muria No.14 Sumber Kab. Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	60 Orang	60 Orang	56.619.600	56.619.400	(200)	8.01.05.05.2.01.04.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kesbangpol. Jl. Sunan Muria No.14 Sumber Kab. Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	60 Orang	60 Orang	56.619.600	56.619.400	(200)
8.01.05.05.2.01.05.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di, Daerah	Kesbangpol. Jl. Sunan Muria No.14 Sumber Kab. Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	3 Laporan	3 Laporan	32.490.000	32.490.000	-	8.01.05.05.2.01.05.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di, Daerah	Kesbangpol. Jl. Sunan Muria No.14 Sumber Kab. Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	3 Laporan	3 Laporan	32.490.000	32.490.000	-
8.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Prosentase Peningkatan keamanan dan kenyamanan Lingkungan yang dilakukan		14 Prosen	14 Prosen	1.153.541.400	2.153.541.400	1.000.000.000	8.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Prosentase Peningkatan keamanan dan kenyamanan Lingkungan yang dilakukan		14 Prosen	14 Prosen	1.153.541.400	2.153.541.400	1.000.000.000
		Prosentase meningkatnya ketentrangan dan ketertiban umum dalam kerangka kesatuan berbangsa		13 Prosen	13 Prosen	223.699.500	223.699.200	(300)			Prosentase meningkatnya ketentrangan dan ketertiban umum dalam kerangka kesatuan berbangsa		13 Prosen	13 Prosen	223.699.500	223.699.200	(300)
8.01.06.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		1 BA	1 BA	2.377.240.600	2.377.240.600	-	8.01.06.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		1 BA	1 BA	2.377.240.600	2.377.240.600	-
8.01.06.06.2.01.01.	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Kesbangpol. Jl. Sunan Muria No.14 Sumber Kab. Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	14 Dokumen	14 Dokumen	-	-	-	8.01.06.06.2.01.01.	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Kesbangpol. Jl. Sunan Muria No.14 Sumber Kab. Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	14 Dokumen	14 Dokumen	-	-	-

8.01.06.06.2.01.02.	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Kesbangpol. Jl. Sunan Muria No.14 Sumber Kab. Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	24 Dokumen	24 Dokumen	95.491.000	95.490.900	(100)	8.01.06.06.2.01.02.	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Kesbangpol. Jl. Sunan Muria No.14 Sumber Kab. Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	24 Dokumen	24 Dokumen	95.491.000	95.490.900	(100)
8.01.06.06.2.01.03.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kesbangpol. Jl. Sunan Muria No.14 Sumber Kab. Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	211 Orang	211 Orang	128.208.500	128.208.300	(200)	8.01.06.06.2.01.03.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kesbangpol. Jl. Sunan Muria No.14 Sumber Kab. Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	211 Orang	211 Orang	128.208.500	128.208.300	(200)
8.01.06.06.2.01.04.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kesbangpol. Jl. Sunan Muria No.14 Sumber Kab. Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	258 Orang	258 Orang	120.380.000	120.380.000	-	8.01.06.06.2.01.04.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kesbangpol. Jl. Sunan Muria No.14 Sumber Kab. Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	258 Orang	258 Orang	120.380.000	120.380.000	-
8.01.06.06.2.01.05.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kesbangpol. Jl. Sunan Muria No.14 Sumber Kab. Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	12 Laporan	12 Laporan	45.096.000	45.096.000	-	8.01.06.06.2.01.05.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kesbangpol. Jl. Sunan Muria No.14 Sumber Kab. Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	12 Laporan	12 Laporan	45.096.000	45.096.000	-
8.01.06.06.2.01.06.	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kesbangpol. Jl. Sunan Muria No.14 Sumber Kab. Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	5 Dokumen	5 Dokumen	1.988.065.400	1.988.065.400	1.000.000.000	8.01.06.06.2.01.06.	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kesbangpol. Jl. Sunan Muria No.14 Sumber Kab. Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	5 Dokumen	5 Dokumen	988.065.400	1.988.065.400	1.000.000.000
J U M L A H						14.012.088.302	16.678.661.002	2.666.572.700	J U M L A H						14.012.088.302	16.678.661.002	2.666.572.700



2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon akan menambah/menyempurnakan usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD yang langsung ditujukan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan dan Desa/Kelurahan.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Cirebon berpedoman pada kebijakan nasional yaitu pengembangan strategi pengamanan daerah, peningkatan kesadaran hukum dan hak azasi manusia (HAM) dan dengan kegiatan - kegiatan lainnya serta secara nasional gambaran kondisi umum pada awal pelaksanaan Renja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021 diuraikan dalam bentuk pokok-pokok capaian Tahun 2021, permasalahan dan tantangan pokok kedepan, serta langkah tindak lanjutnya kedepan yang diperlukan terutama pada Tahun 2023.

Sepanjang tahun 2021 dalam Bidang Politik Dalam Negeri, terus berlanjutnya peningkatan proses demokratisasi di tingkat nasional dan daerah serta persatuan dan kesatuan bangsa yang dilaksanakan melalui peningkatan kesadaran politik masyarakat, serta penguatan persatuan dan kesatuan nasional. Dalam kaitan ini, telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan proses demokrasi dan kesadaran warga negara diantaranya dalam hal partisipasi politik melalui penerbitan UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai pengganti UU No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, Implementasi Permendagri No. 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik, serta fasilitasi kerjasama kemitraan dengan 500 Ormas, LSM dan Lembaga Nirlaba lainnya. Dalam kaitan



peningkatan komitmen pemangku kepentingan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta pendekatan dialog dalam penyelesaian berbagai persoalan kemasyarakatan telah dilakukan upaya melalui penyelenggaraan forum komunikasi dan kerjasama Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan berbagai unsur kebangsaan dan pemangku kepentingan (*stakeholders*), forum koordinasi pembauran kebangsaan dan komunitas intelijen daerah, serta Pekan Produk Kreatif Indonesia.

Dalam rangka pengembangan/penguatan lembaga perwakilan dan partisipasi politik telah diterbitkan Permendagri No.57 tahun 2011 Tentang Pedoman Orientasi Pendalaman Tugas DPRD Prov/Kab/Kota; dan rancangan Pedoman Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik, selain itu telah ditetapkan pula kebijakan pengembangan nilai-nilai kebangsaan melalui penerbitan Permendagri Nomor 29 tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam rangka Revitalisasi Nilai-nilai Pancasila, dan Permendagri Nomor 38 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesadaran Bela Negara.

Dalam rangka penanganan konflik, telah tersusunnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik, dan telah dilakukan fasilitasi penanganan konflik di 7 wilayah pasca konflik, 16 wilayah rawan konflik dan 10 wilayah potensi konflik.

Terkait fasilitasi pengembangan proses demokratisasi di daerah, diantaranya melalui kebijakan desentralisasi politik yang telah dimulai sejak tahun 2005, membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan terkait proses



suksesi jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Masalah dan tantangan pokok kedepan Masih belum sejalannya semangat dan kebebasan politik yang besar pada masyarakat dengan ruang politik yang dapat menjalankan fungsi untuk menghimpun dan menyalurkan aspirasi masyarakat; masih rendahnya kinerja sebagian organisasi kemasyarakatan (ormas), sehingga kehadiran mereka belum memberikan kontribusi optimal bagi masyarakat maupun terkait perannya sebagai salah satu pilar pemerintahan yang baik (*good governance*) kemasyarakatan secara umum. Indikasi tersebut antara lain masih adanya ketidakjelasan ikatan ormas dengan kelompok masyarakat yang kepentingannya diperjuangkan, gerakan yang dilakukan lebih bersifat kasuistis, insidental, sporadis, dan belum didasarkan pada perspektif kerja berjangka panjang; masih munculnya riak-riak issue bertema disintegrasi, belum sepenuhnya terbentuk pemahaman tentang pentingnya orientasi dan visi bersama mengenai integrasi bangsa dalam penyelenggaraan pemerintahan secara nasional (antara Pusat dan daerah) serta dalam menegakkan dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Oleh karenanya, hal-hal yang perlu ditindak lanjuti dalam Bidang Politik Dalam Negeri adalah :

- a. Mendorong dan memfasilitasi partai politik untuk terus menerus meningkatkan kapasitasnya dalam melaksanakan fungsinya melalui fasilitasi dan pemberian dukungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fasilitasi dan dukungan yang secara khusus diberikan adalah melalui pemberian bantuan keuangan bagi partai politik



yang diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat. Pengembangan sistem dan praktik penyelenggaraan pemerintahan khususnya di daerah, yang berwawasan nasional dan berlandaskan semangat wawasan kebangsaan terus dilakukan. Dalam kaitan ini, unsur-unsur penyelenggara pemerintahan daerah tidak saja harus mampu mengembangkan dan melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam penguatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air, tetapi juga harus mampu menjadi pelaku dan pelopor dari penciptaan kondisi-kondisi yang akan mendorong terciptanya ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, penanganan konflik dan pengembangan kewaspadaan dini masyarakat, serta pembinaan kerukunan umat beragama.

- b. Beberapa tantangan kedepan dalam upaya menjaga proses konsolidasi demokrasi di Indonesia dan penegakan hukum, antara lain: (1) pengembangan pola hubungan eksekutif dan legislatif dalam kerangka meningkatkan kualitas demokrasi; (2) peran partai politik dan organisasi masyarakat sipil dalam melaksanakan agregasi politik, komunikasi politik, artikulasi politik, dan pendidikan politik kepada masyarakat; (3) perbaikan proses politik melalui Pemilu dan pemilu kepala daerah (pemilukada) terkait penyiapan perangkat peraturan perundangan terkait sesuai jadwal, peningkatan kapasitas dan kredibilitas lembaga penyelenggara pemilu, serta pemahaman dan kesadaran politik masyarakat yang lebih baik; (4) peningkatan kepercayaan masyarakat terkait upaya menjaga nilai-nilai pluralisme atau kemajemukan bangsa, termasuk komitmen melindungi kebebasan beragama, keyakinan politik, latar belakang etnis dan sosial budaya, serta menghindari bentuk-bentuk



kekerasan dalam menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat; (5) penguatan lembaga-lembaga penegak hukum dan independensinya yang semakin bersih dari berbagai kepentingan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya; serta (6) upaya pemberantasan korupsi yang didukung aparat penegak hukum yang memiliki integritas maupun penyelamatan asset hasil korupsi.

- c. Mewujudkan pemerintahan daerah yang lebih efektif melalui penyelenggaraan Pilkada yang berkualitas. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota oleh Pemerintah dan kedepan diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang komprehensif sebagai satu upaya untuk mewujudkan Pilkada berkualitas, serta mengurangi adanya sengketa hasil pasca Pilkada.

Sehubungan dengan hal di atas, yang menjadi Prioritas Nasional Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan khususnya Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah melaksanakan Kegiatan Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan dengan sasaran Terlaksananya penyusunan kebijakan, dukungan dan fasilitasi pengembangan nilai-nilai kebangsaan, dan indikatornya adalah (1) Tersusunnya Modul Wawasan Kebangsaan pengembangan nilai kebangsaan; dan (2) Terlaksananya 20 kali penguatan forum dialog dan sosialisasi pengembangan nilai kebangsaan untuk pemuda, perempuan dan aparatur pemerintah.



Sedangkan yang menjadi prioritas Bidang dengan target capaian yang akan dilaksanakan Kemendagri sebagaimana tercantum dalam Buku II RKP pada Tahun 2012 berupa Prioritas Bidang yang dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan diantaranya yang diantaranya adalah :

- a. Kegiatan Fasilitasi Kewaspadaan Nasional dengan Sasaran Terlaksananya penyusunan kebijakan dan fasilitasi penanganan konflik, dan Indikatornya (1) Tercapainya 85% kemajuan penetapan UU Penanganan Konflik sosial; (2) Tercapainya 65% provinsi/kabupaten/kota yang mendapatkan fasilitasi pembentukan dan fasilitasi pelembagaan penguatan forum dialog penyelesaian konflik; (3) Tercapainya 10 angkatan aparatur pemda yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan manajemen konflik dan negosiasi; (4) Terfasilitasinya 7 wilayah pasca konflik (NAD, Kalteng, Sulteng, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan NTT), 16 wilayah rawan konflik, 10 wilayah potensi konflik dalam penanganan konflik berkaitan dengan aspek pemerintahan dan keamanan, melalui pembentukan dan pelembagaan penguatan forum dialog penyelesaian konflik; (5) Terlaksananya 100 kerjasama di 33 provinsi kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil dalam penanganan konflik; (6) Tercapainya 77,50% Penyusunan Rumusan Kebijakan dan Desiminasi bidang Kewaspadaan Nasional; dan (7) Tercapainya 75% layanan administrasi, Lembaga Asing dan orang asing.
- b. Kegiatan Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dengan sasaran Terlaksananya penyusunan kebijakan, dukungan dan fasilitasi pengembangan nilai-nilai Kebangsaan dan indikatornya (1) Tercapainya 80% penyelesaian rumusan kebijakan dan Desiminasi Bina Ideologi dan



Wawasan Kebangsaan Indonesia yang tepat waktu; (2) Tersusunnya Modul Pengembangan Nilai Kebangsaan yaitu 1 Modul Wawasan Kebangsaan, 1 modul Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi Bangsa, 1 Modul Bela Negara; (3) Terbentuknya 20 penguatan forum dialog dan sosialisasi pengembangan nilai kebangsaan untuk pemuda, perempuan, aparatur pemerintah; (4) Terlaksananya TOT/peningkatan kapasitas kader pembauran di 7 provinsi (tiap provinsi 7 orang); (5) Tercapainya 78% tingkat kepuasan layanan ijin penelitian bagi masyarakat; (6) Terbentuknya 134 kerjasama di 33 provinsi dengan organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan (7) Terfasilitasinya 33 provinsi dalam pengembangan kelompok kerja demokrasi dan pendampingan pusat pendidikan kebangsaan.

- c. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi dengan Sasaran 1) Terlaksananya penyusunan kebijakan, dukungan dan fasilitasi pengembangan nilai-nilai kebangsaan, dengan indikatornya (1) Tercapainya 77,50% penyusunan rumusan kebijakan pendidikan perdamaian yang akuntabel dan tepat waktu; (2) 134 paket kerja sama pembinaan dan pengembangan budaya politik di wilayah miskin, terisolasi, perbatasan dan kaum marjinal; (3) 134 paket kerjasama di 33 provinsi terkait sosialisasi perundang-undangan dan cinta tanah air; (4) 33 provinsi yang mendapatkan fasilitasi pengembangan kelompok kerja demokrasi dan pendampingan pusat pendidikan kewarganegaraan; dan Sasaran 2) Terlaksananya penyusunan kebijakan, pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, dengan indikatornya (1) Tersusunnya 1 dokumen evaluasi UU No 9 Tahun 1961



mengenai Pengumpulan Uang atau Barang; (2) Tercapainya 50% kemajuan pengembangan *Democracy Trust Fund*; (3) Tersusunnya 1 laporan masukan hasil uji *public* fasilitasi pertemuan, forum dan uji publik untuk masukan penyusunan naskah akademis dan draft RPP Insentif Perpajakan.

- d. Kegiatan Fasilitasi Politik Dalam Negeri dengan sasaran Terlaksananya penyusunan kebijakan, dukungan dan fasilitasi lembaga perwakilan dan partisipasi politik, dengan indikatornya (1) Tercapainya 85% penyusunan dan diseminasi rumusan kebijakan bidang politik dalam negeri yang akuntabel dan tepat waktu; (2) Tercapainya 85% pelaksanaan fasilitasi hubungan kerja antar pemerintah dengan lembaga perwakilan; (3) Terfasilitasinya 3 forum komunikasi politik; (4) Sebanyak 27 Provinsi menyampaikan laporan pemantauan dan pelaporan perkembangan politik yang tepat waktu; (5) Kemajuan penyusunan rancangan revisi terbatas UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD; (6) Kemajuan penyusunan rancangan revisi terbatas UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD; (7) Kemajuan penyusunan rancangan revisi terbatas UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; (8) Sebanyak 100 kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dalam peningkatan partisipasi politik perempuan; (9) Sebanyak 9 parpol yang mendapatkan Bantuan Keuangan dan laporan pelaksanaan verifikasi, fasilitasi audit, penguatan kelembagaan dan evaluasi keuangan Parpol; (10) Sebanyak 234 kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil dalam pengembangan politik dalam negeri; dan (11) Tersusunnya 1 modul



pendidikan politik bagi calon pemilih pemula; (12) Sebanyak 50 publikasi *best practices* dan inovasi praktek demokrasi.

- e. Kegiatan Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan dengan Sasaran Terlaksananya penyusunan kebijakan, fasilitasi dan dukungan bagi peningkatan peran organisasi politik dan kemasyarakatan dan indikatornya (1) 500 Ormas, LSM dan LNL yang mendapatkan peningkatan kapasitas; (2) Tercapainya 100% kemajuan rancangan revisi UU No. 8 tahun 1985 tentang Ormas; (3) Tercapainya 85% Prosentase kemajuan penyusunan, desiminasi, monitoring dan evaluasi rumusan kebijakan, perbaikan mekanisme dan prosedur penyelenggaraan kebijakan publik bidang ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan; (4) Tercapainya 55% Fasilitasi Forum dan Monev Bidang ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan; (5) Tercapainya 65% Tingkat pelayanan Publik termasuk data basenya; dan (6) Tercapainya 98% peningkatan kapasitas SDM Aparatur Pemerintah dan pemerintah daerah.

Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, bertujuan memperkokoh kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri yang dilandasi semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 melalui pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat. Program ini dilaksanakan melalui 6 kegiatan, yaitu: (1) Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan; (2) Fasilitasi Politik Dalam Negeri; (3) Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi. (4) Fasilitasi Kewaspadaan Nasional; (5) Bina Ideologi dan Wawasan



Kebangsaan; dan (6) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik.

III.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi factor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon Tahun 2023 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2024 untuk program dan kegiatan di tahun 2023 adalah sebagai berikut :

a. Tujuan

Sebagaimana visi dan misinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tujuan sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya rasa aman, tenang dan tertib bagi masyarakat Kabupaten Cirebon;
- 2) Terwujudnya kehidupan masyarakat yang demokratis, beretika dan partisipatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;



- 3) Terwujudnya masyarakat yang agamis dan berwawasan kebangsaan.

b. Sasaran

Untuk mewujudkan Visi, misi dan tujuan sebagaimana dimaksud di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan sasaran sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya kondusifitas daerah dan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Cirebon;
- 2) Meningkatnya kesadaran dan budaya politik masyarakat yang demokratis, partisipatif, jujur, adil dan beretika;
- 3) Meningkatnya hubungan partisipatif yang harmonis antar lembaga pemerintah, lembaga politik, dan lembaga sosial dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan masyarakat Kabupaten Cirebon;
- 4) Meningkatnya toleransi umat beragama / antar umat beragama dan berwawasan kebangsaan



Dalam Renstra ditetapkan target capaian kinerja sasaran sebagaimana terurai sesuai indikator kinerja utamanya (IKU) pada tabel berikut :

No.	SASARAN		SATUAN	TARGET TAHUN					
	URAIAN	INDIKATOR		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Prosen	0	70	75	80	85	90
2.	Meningkatnya penyelesaian pelanggaran norma agama, sosial dan adat	Penyelesaian Pelanggaran Norma agama, sosial, dan adat	Prosen	75	80	82	84	86	88
3.	Meningkatnya Penyelesaian Konflik Sosial	Prosentase Penyelesaian Konflik Sosial	Prosen	75	80	83	85	87	88
4.	Meningkatnya penyelesaian pergesekan (friksi) antar dan Internal umat beragama	Prosentase Penyelesaian Friksi/Gesekan antar umat beragama	Prosen	75	78	80	81	82	83

Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Menciptakan diferensiasi produk pelayanan prima yang berupa fasilitasi koordinasi, konsultasi, supervisi, rekomendasi dengan mutu, mekanisme, tata cara, aturan dan pola kerja sesuai tatanan ideal proses pemerintahan dan berkehidupan masyarakat;
- b. Menciptakan pusat kajian dan sosialisasi bidang kesatuan bangsa dan politik
- c. Memelihara dan melestarikan heterogenitas masyarakat yang merupakan potensi kekayaan budaya daerah untuk tetap memelihara perlindungan masyarakat dan menjalin kesatuan dan persatuan;



- d. Mengembangkan kreatifitas masyarakat dengan memotivasinya ke arah kehidupan social dan politik yang bernuansa HAM, berkeadilan, bertanggung jawab, dan mampu berkompetisi secara sehat dan dinamis;
- e. Memperbaiki dan meningkatkan kualitas warga dalam kehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan melalui pendidikan politik yang berkesinambungan;
- f. Memelihara dan menghormati komunitas kehidupan sosial dan politik di masyarakat yang berorientasi pada pengembangan masyarakat madani yang dicita-citakan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kebijakan yang diambil adalah sebagai berikut :

- a. meningkatkan kapasitas sumber daya Aparatur serta sarana dan prasarana kerja;
- b. meningkatkan dan mengembangkan dukungan dan jalinan di berbagai jaringan kerja hingga tingkat desa/kelurahan (Ipoleksosbud Hankam dan Agama) dalam tatanan ketahanan.
- c. meningkatkan kualitas mediasi/fasilitasi perumusan permasalahan rakyat Kabupaten Cirebon yang sesungguhnya melalui Operasional Forum Komunitas Intelejen Daerah (Kominda), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Daerah (FKDM) dan Forum Komunikasi Kondisi Daerah (Forkomkonda) Kabupaten Cirebon ;
- d. meningkatkan Pengetahuan dan pemahaman wawasan kebangsaan dan cinta tanah air yang beretika dan bermoral Pancasila, serta terpantaunya aliran-aliran sesat yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon;



- e. meningkatkan pemahaman dan kesadaran etika dan budaya demokratisasi masyarakat yang Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui pemberdayaan lembaga pemerintahan, partai politik, organisasi kemasyarakatan dan LSM.

III.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa unit kerja dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Kebijakan tersebut diterjemahkan dalam program operasional organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon melalui unsur-unsurnya,

Pada tahun 2023 dilaksanakan 6 program dan 44 kegiatan, yang dilakukan oleh seluruh bidang terkait beserta unsur lainnya di lingkup Pemerintah Daerah dan seluruh lapisan masyarakat.

Diharapkan seluruh program dan kegiatannya dapat disebar di segenap lapisan dengan lokasi yang tidak hanya di Ibu Kota Kabupaten tetapi lebih mendekati kepada sasaran dan kepentingannya. Hal ini dikarenakan usulan program dan kegiatan lebih diutamakan dapat bersumber dari lapisan terbawah di masyarakat dan kembali dilaksanakan di Kecamatan dan Desa/Kelurahannya masing-masing dengan fasilitasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.



BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Perubahan menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab SKPD dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon adalah **Program Tahunan** Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon selain menjadi program kegiatan Tahun 2023 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023, RENJA Perubahan juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon. RENJA Perubahan juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang.

LAMPIRAN



**PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

PERANGKAT DAERAH: 8-1.0-0.0-0.01. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Asal Ajuan	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8-7)	10	11
8.	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					14.012.088.302	29.411.885.802	15.399.797.500		
8.01.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					14.012.088.302	29.411.885.802	15.399.797.500		
8.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang sesuai standar kebutuhan pelayanan prima		75 Prosen	75 Prosen	282.706.000	303.541.000	20.835.000		
		prosentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai dengan standar pelayanan		82 Prosen	82 Prosen	634.528.302	688.169.802	53.641.500		
		Prosentase meningkatnya disiplin aparatur		94 Prosen	94 Prosen	4.087.441.300	4.403.394.100	315.952.800		
		Prosentase meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang transparan akuntabel dan informatif		100 Prosen	100 Prosen	57.596.000	57.596.000	-		
		Prosentase meningkatnya sistem perencanaan sektoral		100 Prosen	100 Prosen	73.383.700	73.383.700	-		
8.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 BA	1 BA	117.812.500	117.812.500	-		
8.01.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat, Daerah	Kabupaten Cirebon	5 Dok	5 Dok	73.383.700	73.383.700	-	PIS	PIS
8.01.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Cirebon	4 Laporan	4 Laporan	44.428.800	44.428.800	-	PIS	PIS

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Asal Ajuan	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8-7)	10	11
8.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1 BA	1 BA	4.395.355.500	4.395.355.500	-		
8.01.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan, Tunjangan ASN	Kabupaten Cirebon	17 Orang/Bulan	17 Orang/Bulan	4.066.235.500	4.382.188.300	315.952.800	PIS	PIS
8.01.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Cirebon	1 Laporan	1 Laporan	6.823.200	6.823.200	-	PIS	PIS
8.01.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kabupaten Cirebon	4 Laporan	4 Laporan	6.344.000	6.344.000	-	PIS	PIS
8.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		1 BA	1 BA	21.205.800	21.205.800	-		
8.01.01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut, Kelengkapan	Kabupaten Cirebon	36 Paket	36 Paket	21.205.800	21.205.800	-	PIS	PIS
8.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		1 BA	1 BA	460.139.400	460.139.400	-		
8.01.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi, Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Cirebon	8 Paket	8 Paket	9.026.800	9.026.800	-	PIS	PIS
8.01.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan, Kantor yang Disediakan	Kabupaten Cirebon	4 Paket	4 Paket	62.632.200	123.756.200	61.124.000	PIS	PIS
8.01.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang, Disediakan	Kabupaten Cirebon	2 Paket	2 Paket	2.717.200	2.717.200	-	PIS	PIS

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Asal Ajuan	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8-7)	10	11
8.01.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan, yang Disediakan	Kabupaten Cirebon	18 Paket	18 Paket	28.000.100	27.021.800	(978.300)	PIS	PIS
8.01.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	3 Dokumen	3 Dokumen	19.100.000	19.100.000	-	PIS	PIS
8.01.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kabupaten Cirebon	49 Paket	49 Paket	141.416.100	141.416.100	-	PIS	PIS
8.01.01.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Cirebon	3 Laporan	3 Laporan	13.095.000	13.095.000	-	PIS	PIS
8.01.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat, Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Cirebon	45 Laporan	45 Laporan	130.467.900	124.006.300	(6.461.600)	PIS	PIS
8.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1 BA	1 BA	233.905.000	233.905.000	-		
8.01.01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kabupaten Cirebon	2 Unit	2 Unit	13.070.000	33.905.000	20.835.000	PIS	PIS
8.01.01.2.07.10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-(Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	3 Unit	3 Unit	200.000.000	200.000.000	-	PIS	PIS
8.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		5 BA	5 BA	99.827.152	99.827.152	-		
8.01.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	3 Laporan	3 Laporan	81.817.152	81.817.152	-	PIS	PIS
8.01.01.2.08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan, Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Cirebon	5 Laporan	5 Laporan	18.010.000	18.010.000	-	PIS	PIS

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Asal Ajuan	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8-7)	10	11
8.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 BA	1 BA	197.839.250	197.839.250	-		
8.01.01.2.09.0 1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Cirebon	25 Unit	25 Unit	136.074.850	111.395.750	(24.679.100)	PIS	PIS
8.01.01.2.09.0 2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kabupaten Cirebon	21 Unit	21 Unit	10.181.000	34.817.500	24.636.500	PIS	PIS
8.01.01.2.09.0 5.	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kabupaten Cirebon	6 Unit	6 Unit	2.045.000	2.045.000	-	PIS	PIS
8.01.01.2.09.0 9.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Cirebon	6 Unit	6 Unit	49.581.000	49.581.000	-	PIS	PIS
8.01.02.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Prosentase meningkatnya wawasan kebangsaan warga negara		25 Prosen	25 Prosen	1.216.384.200	1.028.764.400	(187.619.800)		
		Prosentase meningkatnya kemitraan dalam berwawasan kebangsaan		17 Prosen	17 Prosen	-	-	-		
8.01.02.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan pematapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pematapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		1 BA	1 BA	1.028.764.400	1.028.764.400	-		
8.01.02.2.01.0 1.	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan, yang Disusun	Kesbangpol. Jl. Sunan Muria No.14 Sumber Kab. Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	4 Dokumen	4 Dokumen	37.546.000	37.546.000	-	PIS	PIS

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Asal Ajuan	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8-7)	10	11
8.01.02.2.01.03.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan, Sejarah Kebangsaan	Kesbangpol. Jl. Sunan Muria No.14 Sumber Kab. Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	890 Orang	890 Orang	1.089.112.600	901.492.800	(187.619.800)	PIS	PIS
8.01.02.2.01.04.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah, Kebangsaan	Kesbangpol. Jl. Sunan Muria No.14 Sumber Kab. Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	60 Orang	60 Orang	55.255.600	55.255.600	-	PIS	PIS
8.01.02.2.01.05.	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan, Sejarah Kebangsaan	Kesbangpol. Jl. Sunan Muria No.14 Sumber Kab. Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	3 Laporan	3 Laporan	34.470.000	34.470.000	-	PIS	PIS
8.01.03.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Prosentase peningkatan kualitas pendidikan politik masyarakat		87 Prosen	87 Prosen	4.112.563.000	16.176.195.200	12.063.632.200		
8.01.03.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwaki		1 BA	1 BA	16.176.195.200	16.176.195.200	-		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Asal Ajuan	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8-7)	10	11
8.01.03.2.01.01.	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Kesbangpol. Jl. Sunan Muria No.14 Sumber Kab. Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	879 Dokumen	879 Dokumen	95.466.800	94.386.700	(1.080.100)	PIS	PIS
8.01.03.2.01.03.	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kesbangpol. Jl. Sunan Muria No.14 Sumber Kab. Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	484 Orang	484 Orang	101.255.800	96.328.300	(4.927.500)	PIS	PIS
8.01.03.2.01.05.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kesbangpol. Jl. Sunan Muria No.14 Sumber Kab. Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	25 Laporan	25 Laporan	3.915.840.400	15.985.480.200	12.069.639.800	PIS	PIS
8.01.04.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Prosentase Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat		25 Prosen	25 Prosen	523.414.300	1.273.414.200	749.999.900		
8.01.04.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat		1 BA	1 BA	1.273.414.200	1.273.414.200	-		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Asal Ajuan	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8-7)	10	11
8.01.04.2.01.01.	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah, yang Disusun	Kesbangpol. Jl. Sunan Muria No.4 Sumber Kab. Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-		
8.01.04.2.01.02.	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Kesbangpol. Jl. Sunan Muria No.14 Sumber Kab. Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	2 Dokumen	2 Dokumen	160.952.500	160.952.500	-	PIS	PIS
8.01.04.2.01.03.	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kesbangpol Jl. Sunan Muria No.14 Sumber Kab. Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	1.856 Orang	1.856 Orang	288.662.000	888.662.000	600.000.000	PIS	PIS
8.01.04.2.01.05.	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kesbangpol. Jl. Sunan Muria No.14 Sumber Kab. Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	8 Laporan	8 Laporan	73.799.800	223.799.700	149.999.900	PIS	PIS
8.01.05.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Prosentase Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		25 Prosen	25 Prosen	1.646.830.600	1.416.683.600	(230.147.000)		
8.01.05.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya		1 BA	1 BA	1.416.683.600	1.416.683.600	-		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Asal Ajuan	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8-7)	10	11
8.01.05.2.01.0 1.	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Kesbangpol. Jl. Sunan Muria No.14 Sumber Kab. Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	3 Dokumen	3 Dokumen	36.841.000	36.841.000	-	PIS	PIS
8.01.05.2.01.0 2.	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Kesbangpol. Jl. Sunan Muria No.14 Sumber Kab. Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	-		
8.01.05.2.01.0 3.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di, Daerah	Kesbangpol. Jl. Sunan Muria No.14 Sumber Kab. Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	2.660 Orang	2.660 Orang	1.520.880.000	1.290.733.200	(230.146.800)	PIS	PIS
8.01.05.2.01.0 4.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kesbangpol. Jl. Sunan Muria No.14 Sumber Kab. Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	60 Orang	60 Orang	56.619.600	56.619.400	(200)	PIS	PIS
8.01.05.2.01.0 5.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di, Daerah	Kesbangpol. Jl. Sunan Muria No.14 Sumber Kab. Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	3 Laporan	3 Laporan	32.490.000	32.490.000	-	PIS	PIS

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Asal Ajuan	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8-7)	10	11
8.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Prosentase Peningkatan keamanan dan kenyamanan Lingkungan yang dilakukan		14 Prosen	14 Prosen	1.153.541.400	3.767.044.600	2.613.503.200		
		Prosentase meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum dalam kerangka kesatuan berbangsa		13 Prosen	13 Prosen	223.699.500	223.699.200	(300)		
8.01.06.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		1 BA	1 BA	3.990.743.800	3.990.743.800	-		
8.01.06.2.01.0 1.	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Kesbangpol. Jl. Sunan Muria No.14 Sumber Kab. Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	14 Dokumen	14 Dokumen	-	-	-		
8.01.06.2.01.0 2.	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Kesbangpol. Jl. Sunan Muria No.14 Sumber Kab. Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	24 Dokumen	24 Dokumen	95.491.000	95.490.900	(100)	PIS	PIS

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Asal Ajuan	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8-7)	10	11
8.01.06.2.01.03.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kesbangpol. Jl. Sunan Muria No.14 Sumber Kab. Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	211 Orang	211 Orang	128.208.500	128.208.300	(200)	PIS	PIS
8.01.06.2.01.04.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kesbangpol. Jl. Sunan Muria No.14 Sumber Kab. Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	258 Orang	258 Orang	120.380.000	120.380.000	-	PIS	PIS
8.01.06.2.01.05.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kesbangpol. Jl. Sunan Muria No.14 Sumber Kab. Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	12 Laporan	12 Laporan	45.096.000	74.916.000	29.820.000	PIS	PIS
8.01.06.2.01.06.	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kesbangpol. Jl. Sunan Muria No.14 Sumber Kab. Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	5 Dokumen	5 Dokumen	988.065.400	3.571.748.600	2.583.683.200	PIS	PIS
J U M L A H						14.012.088.302	29.411.885.802	15.399.797.500		

Sumber, 01 September 2023
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Dra. Hj . ITA ROHPITASARI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660810 198709 2 001